



KEBIJAKAN IMIGRASI JERMAN DALAM MENGHADAPI KEBUTUHAN EKONOMI DAN TANTANGAN SOSIAL

Nabilla Kharisma Ardhaneswari¹

Joito Banjarnahor²

Siti Maryam³

Abstrak:

Studi ini menganalisis kebijakan imigrasi Jerman melalui pendekatan aktor rasional, dengan fokus pada Skilled Immigration Act dan Blue Card sebagai instrumen utama dalam menarik tenaga kerja terampil dari luar Uni Eropa. Dengan kebijakan ini, analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi, terdapat risiko ketimpangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatnya ketegangan sosial. Sentimen anti-imigrasi di beberapa wilayah Jerman juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam merancang kebijakan integrasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, program integrasi seperti pelatihan bahasa, orientasi budaya, serta kemudahan akses ke pasar tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan imigrasi Jerman mencerminkan keputusan strategis berbasis rasionalitas ekonomi dan stabilitas sosial. Meskipun telah memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini perlu terus dievaluasi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memastikan keseimbangan antara pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas dengan integrasi sosial yang harmonis.

Kata Kunci: Aktor Rasional, Ekonomi, Jerman, Kebijakan Imigrasi, Tantangan Sosial

¹ *Hubungan Internasional*

Universitas Satya Negara Indonesia.
e-mail : nabillakharisma04@gmail.com

² *Hubungan Internasional*

Universitas Satya Negara Indonesia.
e-mail : joitobanjarnahor0@gmail.com

³ *Hubungan Internasional*

Universitas Satya Negara Indonesia.
e-mail : iyamsiti1106@gmail.com

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan imigrasi menjadi salah satu isu sentral di berbagai negara, terutama di Eropa. Sejak krisis imigran yang terjadi sejak 2015, Uni Eropa menghadapi masalah yang serius. Sebanyak 5,2 juta orang telah meninggalkan negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Iraq untuk mengungsi ke Yunani, Spanyol, dan Italia. Kebijakan suaka telah dipengaruhi oleh krisis imigran yang melanda Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa sangat mengecam hal ini karena dengan banyaknya imigran akan mengancam stabilitas keamanan mereka. Negara-negara seperti Hungaria, Yunani, dan Italia sangat keberatan dengan banyaknya imigran yang masuk ke negara mereka (Sugito, 2021) Uni Eropa sebagai organisasi kawasan supranasional yang terdiri banyak negara anggota memiliki kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk mengelola arus migrasi, termasuk migrasi tenaga kerja, secara kolektif dan terkoordinasi. Pengelolaan imigrasi tenaga kerja di Uni Eropa bertumpu pada prinsip-prinsip solidaritas, efisiensi pasar tenaga kerja, dan perlindungan hak asasi manusia.

Instrumen kebijakan imigran utama yang digunakan adalah Blue Card Directive, yang diberlakukan untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil dari luar UE ke negara-negara anggotanya. Sistem ini memberikan izin tinggal dan kerja bagi pekerja terampil berdasarkan kualifikasi tinggi, pengalaman kerja, dan kontrak kerja dengan standar tertentu. Selain itu, Uni Eropa juga bekerja sama dengan negara-negara asal tenaga kerja untuk mengelola migrasi legal, sekaligus memerangi migrasi ilegal melalui pengawasan perbatasan oleh badan seperti Frontex. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola imigrasi secara lebih efektif dan menjaga keamanan di dalam wilayah Uni Eropa. Dengan demikian, Jerman, sebagai bagian dari Uni Eropa, terlibat aktif dalam kebijakan imigrasi yang dirumuskan dan

diimplementasikan di tingkat Eropa, yang mencerminkan komitmen bersama untuk menangani isu-isu migrasi dan perlindungan pengungsi (Stel, 2021).

Dalam konteks kebijakan imigrasi Uni Eropa, terdapat beberapa instrumen kebijakan yang telah dikembangkan untuk mengatur arus migrasi tenaga kerja secara terstruktur. Salah satu kebijakan fundamental adalah Common European Asylum System (CEAS) yang menetapkan standar minimum untuk penanganan permohonan suaka dan perlindungan pengungsi di seluruh negara anggota. Sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab humanitarian dengan kepentingan keamanan dan ekonomi negara-negara anggota. Uni Eropa juga telah mengembangkan European Agenda on Migration yang mencakup berbagai aspek pengelolaan migrasi, termasuk penguatan perbatasan eksternal, modernisasi sistem suaka, dan pengembangan jalur migrasi legal untuk tenaga kerja terampil. Melalui agenda ini, Uni Eropa berupaya mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam mengelola arus migrasi, sambil mempertimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja di negara-negara anggota.

Implementasinya, kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan dalam hal koordinasi antarnegara anggota. Beberapa negara, terutama yang berada di perbatasan eksternal Uni Eropa, menghadapi tekanan yang lebih besar dalam mengelola arus migran. Sementara itu, negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat seperti Jerman cenderung menjadi tujuan akhir para migran, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab penanganan migran. Jerman, sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa, telah mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam kebijakannya. Negara ini telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur migrasi tenaga kerja, yang tercermin dalam Skilled Immigration Act (*Fachkräfteinwanderungsgesetz*) yang diberlakukan pada tahun 2020. Undang-undang ini memberikan kemudahan bagi tenaga kerja terampil dari

negara non-UE untuk mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja Jerman, sambil tetap mempertahankan standar kualifikasi yang tinggi.

Tantangan muncul dalam menyelaraskan kebijakan antara negara-negara anggota yang memiliki kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi yang berbeda. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda cenderung menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja terampil karena kondisi ekonominya yang lebih stabil. Di sisi lain, negara-negara anggota yang ekonominya lebih kecil sering kali menjadi tempat transit bagi migran. Uni Eropa mencoba mengatasi perbedaan ini melalui kebijakan seperti mekanisme distribusi tenaga kerja antarnegara anggota dan pemberian dukungan anggaran kepada negara-negara yang menjadi pintu masuk migran. Meskipun Uni Eropa memiliki kebijakan kolektif, masing-masing negara anggota tetap memiliki otonomi dalam mengatur masuknya tenaga kerja asing berdasarkan kebutuhan domestik mereka. Dalam konteks ini, Jerman sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan imigrasi tenaga kerja yang cukup progresif.

Jerman menghadapi tantangan demografis berupa penurunan populasi usia produktif yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara bagian seperti Nordrhein-Westfalen diperkirakan akan mengalami penyusutan populasi usia produktif rata-rata hingga 10%. Dampak lebih signifikan dirasakan oleh wilayah-wilayah yang secara demografis lebih lemah, seperti Thüringen, Sachsen-Anhalt, dan Saarland, di mana penurunan populasi diperkirakan akan terjadi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bahkan daerah yang secara ekonomi kuat dan kaya seperti Bayern serta Baden-Württemberg, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tidak akan sepenuhnya terhindar dari dampaknya (Foundation & Schultz, 2024). Tantangan demografis Jerman yang serius akibat populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah. Perubahan

struktur demografis ini membawa dampak signifikan pada pasar tenaga kerja, terutama dengan mendekatnya masa pensiun bagi generasi baby boomer. Para ekonom memperkirakan bahwa tanpa imigrasi yang memadai, Jerman dapat kehilangan hingga 25% dari tenaga kerjanya pada tahun 2060. Angka ini setara dengan penurunan jumlah tenaga kerja dari 46,4 juta menjadi hanya 35,1 juta, yang akan menimbulkan konsekuensi dramatis terhadap stabilitas ekonomi dan kemakmuran negara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kapasitas tenaga kerja yang diperlukan, Jerman membutuhkan sekitar 288.000 pekerja asing setiap tahun hingga tahun 2040. Hal ini menekankan bahwa kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya melalui migrasi internal dari negara-negara Uni Eropa, tetapi memerlukan arus masuk yang signifikan dari negara-negara di luar UE. Imigrasi tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak untuk menstabilkan potensi tenaga kerja dan memenuhi permintaan pasar. Tanpa strategi migrasi yang efektif, Jerman tidak hanya akan mengalami penurunan produktivitas tetapi juga menghadapi dampak negatif pada sistem kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonominya (Shabani, 2024)

Sebagai salah satu langkah signifikan yang dilakukan Jerman adalah pembaruan Undang-Undang Imigrasi Tenaga Ahli pada November 2023, yang memperkenalkan sistem "Chancenkarte" (Kartu Peluang). Sistem ini memungkinkan tenaga kerja terampil dari luar Uni Eropa untuk mencari pekerjaan di Jerman tanpa harus memiliki kontrak kerja sebelumnya, dengan kriteria penilaian berdasarkan usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan bahasa Jerman. Selain itu, pemerintah Jerman menargetkan untuk menarik 400.000 pekerja terampil dari luar negeri setiap tahun guna mengatasi ketidakseimbangan demografis dan memenuhi kebutuhan sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja.

Namun, di samping kebutuhan Jerman akan tenaga kerja yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah proses integrasi imigran ke dalam masyarakat Jerman, yang sering kali menghadapi hambatan berupa perbedaan bahasa, budaya, dan nilai-nilai sosial. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial serta meningkatkan risiko marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok imigran. Keterbatasan akses ke program pelatihan bahasa dan integrasi membuat beberapa imigran kesulitan menyesuaikan diri dan berkontribusi secara optimal dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, meningkatnya jumlah imigran dapat memberikan tekanan pada sistem pelayanan publik, seperti pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan, yang memerlukan sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk. Di sisi lain, munculnya sentimen anti-imigran di kalangan masyarakat juga menambah kompleksitas, memunculkan ketegangan politik dan sosial yang dapat memperlambat upaya integrasi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan imigrasi tenaga kerja tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola tantangan sosial secara efektif melalui kebijakan inklusi dan program integrasi yang komprehensif (Chance & Brown, 2025).

Oleh karena itu, pemerintah Jerman memerlukan kebijakan imigrasi tenaga kerja yang mampu menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan tantangan sosial yang dihadapi. Kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari masuknya tenaga kerja asing guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin mendesak akibat perubahan demografis, tanpa mengabaikan pentingnya stabilitas sosial. Merespons kebutuhan tersebut, pemerintah Jerman telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan imigrasi yang komprehensif. Salah satu langkah paling signifikan adalah pembaruan Undang-Undang

Imigrasi Tenaga Ahli (Skilled Immigration Act) pada tahun 2020, yang kemudian diperbarui lagi pada November 2023. Undang-undang ini mencakup beberapa inovasi kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja terampil ke Jerman.

Komponen utama dari pembaruan kebijakan ini adalah penerapan sistem "Chancenkarte" atau Kartu Peluang, yang mengadopsi pendekatan berbasis poin untuk mengevaluasi kualifikasi calon imigran. Sistem ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa Jerman, usia, dan keterkaitan dengan Jerman. Inovasi signifikan dari sistem ini adalah memungkinkan pencari kerja terampil untuk memasuki Jerman tanpa kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelumnya, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pencarian kerja.

Pemerintah Jerman juga telah melonggarkan persyaratan kualifikasi untuk beberapa sektor industri. Pengakuan kualifikasi profesional yang diperoleh di luar negeri telah dipermudah, dan proses verifikasi dipercepat melalui digitalisasi prosedur administratif. Selain itu, kebijakan baru ini memperkenalkan "fast-track procedure" untuk profesi-profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja akut, seperti teknologi informasi, kesehatan, dan teknik. Untuk mendukung integrasi tenaga kerja asing, pemerintah federal bekerja sama dengan negara-negara bagian (Länder) telah mengembangkan program integrasi yang komprehensif. Program ini mencakup kursus bahasa Jerman intensif, pelatihan orientasi budaya, dan pendampingan profesional. Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan program-program ini dan memastikan standar kualitas yang konsisten di seluruh negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman dalam menghadapi kebutuhan ekonomi dan

tantangan sosial yang timbul akibat perubahan demografis dan peningkatan arus imigrasi. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menarik tenaga kerja terampil dari negara-negara non-Uni Eropa guna memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, serta mengidentifikasi dampak sosial yang terkait dengan proses integrasi imigran, seperti kesenjangan sosial dan sentimen anti-imigran. Dalam konteks kebijakan imigrasi Jerman, pemerintah federal telah mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk mengelola arus migrasi tenaga kerja. Salah satu instrumen utama adalah *Skilled Immigration Act (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)* yang mulai berlaku pada Maret 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil dari negara-negara non-Uni Eropa dengan menghilangkan berbagai hambatan administratif dan memberikan jalur yang lebih jelas untuk imigrasi legal.

Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk perluasan definisi "tenaga kerja terampil" yang sekarang meliputi lulusan pendidikan vokasi maupun pendidikan tinggi. Hal ini memungkinkan lebih banyak profesional dengan berbagai tingkat kualifikasi untuk mengakses pasar tenaga kerja Jerman. Selain itu, sistem "Chancenkarte" yang diperkenalkan pada November 2023 mengadopsi pendekatan berbasis poin yang menilai calon imigran berdasarkan kriteria seperti kualifikasi, pengalaman kerja, kemampuan bahasa, dan keterkaitan dengan Jerman. Untuk memfasilitasi proses imigrasi, pemerintah Jerman telah mendirikan *Central Office for Immigration of Skilled Workers* yang berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional. Lembaga ini memberikan dukungan komprehensif kepada calon imigran dan pemberi kerja, termasuk bantuan dalam proses pengakuan kualifikasi asing dan pengurusan izin kerja. Proses verifikasi dokumen telah dipercepat melalui digitalisasi prosedur administratif.

Program integrasi menjadi komponen integral dari kebijakan imigrasi Jerman. Federal Office for Migration and Refugees mengoordinasikan berbagai program yang mencakup kursus bahasa wajib, orientasi budaya, dan pendampingan profesional. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa imigran dapat berintegrasi secara efektif ke dalam masyarakat Jerman dan berkontribusi secara optimal dalam pasar tenaga kerja. Dalam aspek perlindungan sosial, kebijakan imigrasi Jerman menjamin akses yang setara ke sistem jaminan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya. Ini mencakup asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran yang setara dengan warga negara Jerman. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah marginalisasi ekonomi dan memastikan standar hidup yang layak bagi komunitas migran.

Untuk mengatasi tantangan integrasi sosial, pemerintah federal telah mengembangkan National Action Plan on Integration yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mempromosikan kohesi sosial dan mengatasi diskriminasi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas migran, dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif. Kebijakan imigrasi Jerman juga mencakup kemitraan bilateral dengan negara-negara asal potensial untuk memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja terampil. Program-program ini meliputi pelatihan prakeberangkatan dan persiapan bahasa, yang bertujuan untuk memperlancar transisi ke pasar tenaga kerja Jerman. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan pengalaman implementasi.

Kerangka Teori

- Aktor Rasional

Pada abad ke-18, Adam Smith, yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern, mengemukakan Teori Tangan Tak Terlihat dalam esainya "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" untuk mendukung pasar bebas. Teori ini mengatakan bahwa meskipun orang membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi karena kita hidup dalam sistem saling ketergantungan, keputusan tersebut akhirnya akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Smith berpendapat bahwa pasar secara alami akan menemukan keseimbangan, jadi kebijakan pemerintah harus diminimalkan. Teori aktor rasional didasarkan pada gagasan bahwa orang adalah pembuat keputusan rasional yang bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Teori aktor rasional mengatakan bahwa orang adalah pengambil keputusan rasional yang mengevaluasi semua informasi dan pilihan yang tersedia bagi mereka untuk membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang mereka inginkan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, memilih pilihan yang memaksimalkan manfaat mereka dan meminimalkan biaya mereka. Bidang-bidang seperti ekonomi, ilmu politik, dan psikologi bergantung pada teori aktor rasional untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai situasi (Jones, 2025).

Banyak literatur tentang asumsi aktor rasional baru-baru ini ditulis dalam bidang ilmu hubungan internasional. Namun, pertanyaan apakah orang yang berbicara tentang rasionalitas memiliki arti yang sama masih menjadi perhatian yang kurang. Makalah ini mencoba membahas masalah tersebut dalam dua bagian. Dalam makalah ini, para sarjana realis struktural berbeda dalam pemahaman teori rasionalitas. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mengatakan bahwa aktor rasional memiliki asumsi bersama. Penelitian mendalam menunjukkan bahwa persepsi sarjana neorealis tentang asumsi aktor rasional terkait erat dengan peran yang mereka mainkan pada variabel

sistemik. Mereka telah berusaha keras untuk menjelaskan versi mereka tentang sistem anarkis, tetapi fenomena rasionalitas relatif tidak diperhatikan dalam perdebatan mereka, yang memberi kesan yang salah tentang bagaimana semua orang memahami rasionalitas (Shadunts, 2016).

Graham T. Allison menyatakan bahwa ada tiga model pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan: model politik birokratik, model proses organisasi, dan model aktor rasional. Namun, model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis adalah model aktor rasional. Menurut model aktor rasional, proses pengambilan keputusan terdiri dari tahapan penentuan tujuan, alternatif, konsekuensi, dan pengambilan keputusan. Menurut model ini, keputusan yang dibuat diyakini akan menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan bijak karena didasarkan pada pertimbangan rasional, intelektual, dan kalkulasi untung rugi. Menurut Graham T. Allison, rasionalitas adalah keputusan yang konsisten yang memaksimalkan nilai dalam batas-batas tertentu. Negara mengambil tindakan setelah mempertimbangkan berbagai pilihan dan bertindak secara logis untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan atau pilihan tersebut (Wildatul Husna, 2024).

Model aktor rasional adalah pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa orang-orang rasional yang dapat diandalkan adalah aktor utama dalam kebijakan luar negeri, dan mereka adalah orang yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang matang dan dapat diukur yang memaksimalkan manfaat dan nilai yang dirasakan oleh negara. Interaksi antara negara dan perilaku pemerintah di tingkat negara adalah pusat analisis model aktor rasional. Model ini menganggap bahwa para pembuat kebijakan memiliki akses ke informasi lengkap untuk membuat keputusan yang optimal dan bahwa tindakan yang diambil secara konsisten dan konsisten sepanjang

waktu. Empat langkah utama dalam proses pengambilan keputusan aktor rasional adalah sebagai berikut: menemukan masalah, menentukan hasil yang diinginkan, mengevaluasi efek pilihan kebijakan yang mungkin, dan akhirnya, membuat keputusan paling rasional untuk memaksimalkan hasil yang menguntungkan. Untuk memahami maksud dan tujuan di balik tindakan kebijakan di luar negeri, pendekatan teoritis aktor rasional dapat bermanfaat. Namun, kritikus model ini berpendapat bahwa pendekatan ini tidak memperhitungkan situasi di mana informasi lengkap mungkin tidak tersedia, serta ide-ide rasionalitas yang relatif subjektif atau elemen yang dapat menghambat pengambilan keputusan rasional (Edu, 2025).

Teori aktor rasional mengatakan bahwa keputusan kebijakan, seperti kebijakan imigrasi, dibuat dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dengan tujuan mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi negara. Oleh karena itu, kebijakan imigrasi Jerman dapat dilihat dari perspektif ini dengan mempertimbangkan bagaimana negara menanggapi kebutuhan dan masalah yang ada, serta bagaimana kebijakan tersebut dikendalikan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), di mana data dan informasi diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan dengan topik kebijakan imigrasi Jerman. Sumber-sumber yang digunakan mencakup dokumen kebijakan resmi pemerintah Jerman, laporan-laporan dari lembaga penelitian dan organisasi internasional, artikel jurnal akademik, publikasi media massa terpercaya, serta data statistik dari Federal Statistical Office Jerman (Statistisches Bundesamt) mengenai tren demografis dan ketenagakerjaan. Pengumpulan data difokuskan pada

periode 2015-2024 untuk memberikan analisis komprehensif tentang perkembangan kebijakan imigrasi Jerman, terutama terkait implementasi Skilled Immigration Act dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial.

Analisis data dilakukan dengan metode interpretasi dan komparasi untuk mengidentifikasi pola-pola kebijakan, menganalisis rasionalitas pengambilan keputusan pemerintah Jerman sebagai aktor rasional, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mengatasi tantangan demografis dan kebutuhan tenaga kerja. Penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan dengan membandingkan berbagai perspektif dari sumber-sumber yang berbeda. Kerangka analisis menggunakan teori aktor rasional untuk memahami logika pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan imigrasi Jerman, dengan mempertimbangkan kalkulasi untung-rugi serta interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks kebijakan imigrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana Jerman sebagai aktor rasional merespons kebutuhan ekonomi sambil mengelola tantangan sosial yang muncul dari kebijakan imigrasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan pengambilan tenaga kerja dari luar Jerman

Undang-Undang Akses Pasar Tenaga Kerja untuk Pengungsi (Beschleunigungsgesetz für Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten) merupakan kebijakan pengambilan tenaga kerja dari luar Jerman, yang dirancang untuk mempercepat integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja Jerman dengan cara yang lebih efisien. Salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah percepatan proses pengeluaran izin kerja bagi pengungsi, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Dengan pengurangan durasi tunggu tersebut, pengungsi dapat segera bekerja dan

memberikan kontribusi kepada ekonomi negara. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor yang membutuhkan, seperti industri dan jasa. Dengan cara ini, diharapkan imigran dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Jerman. Selain itu, kebijakan ini mencakup program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, terutama dalam hal bahasa dan kemampuan kerja, yang bertujuan agar pengungsi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan sosial di Jerman. Fokus lainnya adalah mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan sosial, dengan harapan mereka dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi setelah bergabung dengan pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan langkah Jerman dalam mengelola imigrasi secara strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara (Andiyani et al., 2024).

Pemerintah Jerman, sebagai aktor rasional, mengutamakan kebutuhan ekonomi negara dengan menghadapi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti industri dan layanan. Kebijakan imigrasi dipandang sebagai cara untuk mengatasi masalah ini dengan mendatangkan imigran yang bisa mengisi kekosongan tenaga kerja, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Imigrasi, dalam hal ini, dianggap sebagai aset yang dapat memperkuat ekonomi Jerman, terutama di tengah tren penurunan jumlah tenaga kerja lokal akibat perubahan demografis. Namun, meskipun fokus utama kebijakan ini adalah ekonomi, tantangan sosial dan politik juga mempengaruhi keputusan yang diambil. Munculnya sikap anti-imigrasi di sebagian kalangan masyarakat Jerman, yang sering dipicu oleh dampak negatif yang dirasakan dari gelombang imigrasi, turut mempengaruhi kestabilan politik dan sosial. Di samping itu, strategi integrasi

juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan imigrasi ini. Program-program pelatihan bahasa dan keterampilan kerja disertakan untuk memastikan bahwa imigran dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif dalam masyarakat Jerman. Selain itu, program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan imigran pada bantuan sosial, serta mendukung mereka untuk menjadi anggota produktif dalam pasar tenaga kerja. Dengan integrasi yang sukses, diharapkan potensi terjadinya konflik sosial dapat diminimalkan, dan imigran bisa merasa lebih diterima dalam masyarakat.

Aspek keamanan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kebijakan imigrasi. Pemerintah Jerman perlu mempertimbangkan kecemasan masyarakat tentang potensi ancaman yang bisa muncul sebagai dampak dari arus imigrasi. Untuk merespons kekhawatiran ini, mungkin diperlukan kebijakan yang lebih ketat, namun hal ini berisiko menurunkan daya tarik Jerman sebagai tujuan bagi imigran yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari keseimbangan yang cermat antara memberikan kesempatan bagi imigran untuk berkontribusi pada perekonomian dan memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Secara keseluruhan, kebijakan imigrasi Jerman mencerminkan keputusan yang diambil dengan memperhitungkan berbagai kepentingan ekonomi, tantangan sosial, dan dinamika politik yang rumit. Dalam menghadapi berbagai tekanan ini, pemerintah berusaha mencari solusi terbaik, meskipun perdebatan dan tantangan terkait kebijakan ini diperkirakan akan terus berlanjut (Andiyani et al., 2024).

Kebijakan ini memicu konflik sosial yang semakin meningkat di tengah masyarakat Jerman, di mana kelompok-kelompok lokal mulai menunjukkan resistensi terhadap proses integrasi imigran. Terjadi peningkatan angka kriminalitas yang melibatkan imigran, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait isu keamanan. Di beberapa

wilayah, imigran merasa terisolasi dan terpinggirkan, situasi yang semakin memperburuk ketegangan sosial. Hal ini menciptakan jurang sosial yang semakin melebar antara imigran dan penduduk lokal. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi mengancam kohesi sosial dalam jangka panjang (Andiyani et al., 2024).

Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, Pemerintah Jerman mulai memberlakukan kebijakan yang lebih ketat, seperti pengawasan perbatasan sementara dan pembatasan jumlah pengunjung. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dianut Jerman dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Selain itu, pemerintah juga mendorong Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan tentang distribusi pengunjung yang lebih adil dan merata di antara negara-negara anggotanya. Kebijakan imigrasi ini tidak hanya mengubah lanskap politik dalam negeri, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan solidaritas di wilayah Eropa. Hal ini juga memicu diskusi ulang tentang identitas nasional dan tanggung jawab kemanusiaan di Jerman (Lutfie et al., 2021).

Selain meningkatkan pengawasan di perbatasan, Jerman juga menerapkan kebijakan Imigrasi Terampil atau *Fachkräfteeinwanderungsgesetz* (FEG). Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja ahli dengan menyederhanakan prosedur bagi pekerja dari negara non-Uni Eropa. Kini, para migran dapat mengajukan visa untuk mencari pekerjaan di Jerman tanpa harus menyertakan kontrak kerja sebelumnya. Tujuan utama kebijakan ini adalah membentuk sistem yang lebih terstruktur dan transparan dalam mengatur arus imigrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan antara imigran yang datang untuk mencari suaka dan mereka yang bertujuan mencari pekerjaan (Palguna, 2024).

Pemerintah Jerman saat ini sedang menjajaki perjanjian migrasi dengan beberapa negara, termasuk Georgia, Moldova, Uzbekistan, dan Kirgizstan. Selain itu, pemerintah juga bersiap untuk melakukan pembicaraan dengan Kenya dan Maroko guna mengatur perekrutan pekerja terampil sekaligus mencegah migrasi ilegal. Kebijakan imigrasi yang liberal di Jerman telah menimbulkan ketegangan sosial, sebagaimana tercermin dalam survei yang dilakukan oleh Civey untuk majalah Focus. Survei tersebut mengungkapkan bahwa 83% warga Jerman merasa khawatir bahwa penerimaan pengungsi dapat menimbulkan masalah terkait keamanan, pasar perumahan, dan sistem kesejahteraan sosial. Di sisi lain, Jerman menghadapi krisis pekerja terampil yang signifikan, yang membuat negara ini, dengan populasi yang semakin menua, sangat bergantung pada imigrasi. Pekerja muda yang berkomitmen, kompeten, dan memiliki kemampuan bahasa Jerman yang baik sangat dibutuhkan sebagai tenaga terampil untuk mendukung perekonomian negara (Xinhua, 2023).

Kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman bertujuan untuk menjawab tantangan demografis yang mengancam stabilitas pasar tenaga kerja. Sejak diberlakukannya Skilled Immigration Act pada tahun 2020, pemerintah telah memberikan jalur lebih mudah bagi tenaga kerja terampil dari luar Uni Eropa untuk memasuki pasar kerja Jerman (Sebastian & Ulceluse, 2019). Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor seperti teknologi, kesehatan, dan manufaktur, kebijakan ini berperan penting dalam mengisi kekosongan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh pekerja lokal (Böhm et al., 2020). Data dari Federal Employment Agency menunjukkan bahwa tingkat pengisian lowongan kerja di sektor teknologi meningkat sebesar 15% sejak kebijakan ini diterapkan (BMWK, 2024).

Namun, meskipun kebijakan ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu isu utama

adalah bagaimana mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja asing tanpa mengorbankan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Beberapa sektor industri di Jerman masih mengalami resistensi terhadap tenaga kerja asing, dengan kekhawatiran bahwa upah pekerja lokal dapat tertekan akibat persaingan dengan pekerja migran (Cerna, 2014). Oleh karena itu, pemerintah Jerman perlu terus mengevaluasi kebijakan insentif dan sistem pengakuan kualifikasi bagi tenaga kerja asing agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja domestik (Sommer, 2021).

B. Analisis Kebijakan Undang-Undang Akses Pasar Tenaga Kerja di Jerman dan Kebijakan Imigrasi Terampil dengan Teori Analisis Aktor Rasional

Jerman, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, telah lama menghadapi tantangan demografi yang signifikan, termasuk populasi yang menua, angka kelahiran yang menurun, dan kekurangan tenaga kerja terampil di berbagai sektor ekonomi. Tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh persaingan global untuk menarik tenaga kerja yang terbatas dari seluruh dunia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Jerman telah menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi akses pasar tenaga kerja bagi orang asing, terutama tenaga kerja terampil. Kebijakan-kebijakan ini meliputi reformasi undang-undang keimigrasian, penyederhanaan prosedur administratif, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualifikasi orang asing. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah Undang-Undang Imigrasi Terampil (Skilled Immigration Act) yang telah berlaku sejak Maret 2020. Undang-undang ini dirancang untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil dari luar Uni Eropa ke pasar tenaga kerja Jerman, terutama di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, seperti teknologi informasi, kesehatan, dan Teknik (Bundesministerium für Arbeit und Soziales., 2020).

Skilled Immigration Act memperluas definisi pekerja terampil untuk mencakup individu yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan kejuruan. Selain itu, undang-undang tersebut juga menghapus persyaratan pemeriksaan prioritas yang sebelumnya mengharuskan perusahaan untuk membuktikan bahwa tidak ada kandidat dari Jerman atau Uni Eropa yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses rekrutmen pekerja asing dan mengurangi birokrasi yang sering menjadi hambatan bagi perusahaan (Brücker, 2020). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi persaingan antara pekerja lokal dan asing, serta dampaknya terhadap upah dan kondisi kerja di Jerman. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menciptakan kemandirian bagi pekerja asing, sementara upaya untuk meningkatkan partisipasi pekerja lokal, seperti perempuan dan kelompok yang lebih tua, masih kurang optimal (Fuchs, 2017).

Selain Skilled Immigration Act, Jerman juga memiliki kebijakan lain yang mendukung integrasi tenaga kerja asing, seperti program Blue Card milik Uni Eropa. Blue Card merupakan izin tinggal dan kerja yang difokuskan pada tenaga kerja terampil dengan kualifikasi akademik tinggi dan tawaran pekerjaan dengan gaji minimum tertentu. Program ini berhasil menarik banyak tenaga kerja dari negara-negara non-UE, terutama dari India, Tiongkok, dan Brasil (Kolb, 2014). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Blue Card masih terbatas karena persyaratan gaji yang relatif tinggi dan minimnya kesadaran pengusaha tentang manfaat program ini (Cerna, 2016). Selain itu, proses administrasi yang rumit dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Blue Card juga menjadi kendala bagi banyak calon tenaga kerja terampil.

Kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman juga didukung oleh upaya peningkatan pengakuan kualifikasi asing. Proses pengakuan kualifikasi sering kali menjadi kendala utama bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Jerman. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Jerman telah menetapkan Undang-Undang Pengakuan (Recognition Act) pada tahun 2012, yang memungkinkan pekerja asing untuk memvalidasi kualifikasi mereka melalui prosedur yang lebih transparan dan terstandarisasi (Bundesministerium für Bildung und Forschung., 2012). Namun, proses ini masih dianggap rumit dan memakan waktu, terutama untuk kualifikasi dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang berbeda dari Jerman (Hoesch, 2018). Beberapa pekerja asing juga menghadapi kesulitan dalam persyaratan tambahan, seperti kemampuan bahasa Jerman yang sering kali menjadi prasyarat untuk memenuhi pekerjaan di sektor-sektor tertentu.

Dampak kebijakan ini terhadap pasar tenaga kerja Jerman telah menjadi subjek berbagai penelitian. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa imigrasi tenaga kerja terampil telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman dengan mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting (Brücker, 2020). Misalnya, di sektor kesehatan, pekerja asing telah membantu mengurangi beban kerja yang dialami oleh tenaga medis lokal.

Di sektor teknologi informasi, pekerja asing telah membawa inovasi dan keterampilan baru yang mendukung pengembangan industri digital di Jerman. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menciptakan ketergantungan pada pekerja asing, sementara upaya untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal, seperti perempuan dan kelompok lanjut usia, masih kurang optimal (Fuchs, 2017). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi pekerja asing ke dalam

masyarakat Jerman masih menghadapi tantangan, termasuk diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses layanan publik.

Selain kebijakan formal, pemerintah Jerman juga telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung integrasi pekerja asing. Misalnya, program Kursus Integrasi (Integration Course) menawarkan pelatihan bahasa dan orientasi budaya bagi para imigran baru. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja asing memahami budaya dan nilai-nilai Jerman, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge., 2021). Meskipun program ini telah membantu banyak imigran, beberapa kritikus berpendapat bahwa program ini masih belum efektif dalam mengatasi tantangan integrasi yang lebih luas, seperti diskriminasi di tempat kerja dan kesulitan dalam mengakses perumahan yang terjangkau. Secara keseluruhan, akses pasar tenaga kerja dan kebijakan imigrasi Jerman mencerminkan upaya negara tersebut untuk mengatasi tantangan demografi dan mempertahankan daya saing ekonominya.

Meskipun kebijakan ini telah membuat beberapa kemajuan, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti mengurangi birokrasi, meningkatkan integrasi pekerja asing, dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pekerja lokal. Dengan terus mempertahankan dan memberikan dampak dari kebijakan ini, Jerman dapat memastikan bahwa sistem ketenagakerjaan imigrasinya tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah Jerman juga perlu mempertimbangkan perluasan kebijakan ini agar mencakup program yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pekerja asing dan lokal.

Dari perspektif teori aktor rasional, kebijakan imigrasi tenaga kerja terampil di Jerman mencerminkan keputusan rasional yang diambil oleh

pemerintah dan pemangku kepentingan berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya. Pemerintah Jerman bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi negara dan menilai bahwa imigrasi tenaga kerja terampil merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi tantangan demografis dan kekurangan tenaga kerja. Dengan melonggarkan regulasi dan menyederhanakan prosedur imigrasi, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik Jerman sebagai destinasi bagi tenaga kerja berkualitas tinggi dari seluruh dunia. Keputusan ini juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di berbagai sektor industri.

Di sisi lain, perusahaan juga bertindak sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimalkan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut individu yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya *Skilled Immigration Act* dan *Blue Card*, perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi tanpa harus menghadapi kendala administratif yang berlebihan. Hal ini mencerminkan logika rasional dalam pengambilan keputusan, di mana perusahaan memilih opsi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang.

Namun, teori aktor rasional juga menjelaskan potensi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu, seperti tenaga kerja lokal yang merasa terancam oleh masuknya tenaga kerja asing. Dari perspektif mereka, kebijakan ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai dengan langkah-langkah untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar mereka tetap kompetitif di pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, kebijakan akses pasar tenaga kerja dan imigrasi terampil di Jerman mencerminkan upaya negara ini untuk mengatasi tantangan demografis dan mempertahankan daya saing

ekonominya. Dengan menerapkan pendekatan yang berbasis pada teori aktor rasional, pemerintah Jerman berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial dalam menghadapi perubahan dinamika tenaga kerja global.

Kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman juga menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah integrasi imigran ke dalam masyarakat Jerman. Hambatan bahasa dan perbedaan budaya sering kali menyebabkan kesulitan bagi tenaga kerja asing dalam menyesuaikan diri di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial (News, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa hampir 45% pekerja migran mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem kerja di Jerman akibat perbedaan norma profesional dan ekspektasi kerja (Remáč, 2015).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Jerman telah menerapkan program integrasi yang lebih komprehensif, termasuk Integration Course yang menyediakan pelatihan bahasa Jerman dan orientasi budaya bagi imigran baru (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2021). Program ini bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja asing dalam perekonomian Jerman. Namun, evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan kapasitas dan durasi kursus yang kurang memadai dalam membangun kompetensi linguistik yang diperlukan (Sommer, 2021).

C. Dampak Kebijakan Pengambilan Tenaga Kerja dari Luar Jerman

Kebijakan pengambilan tenaga kerja luar negeri yang diterapkan Jerman telah menghasilkan berbagai dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap aspek ekonomi dan sosial negara tersebut. Dalam aspek ekonomi, kebijakan ini telah berkontribusi pada pertumbuhan PDB Jerman sebesar 1.2% pada tahun 2023, terutama melalui peningkatan produktivitas

di sektor-sektor kunci seperti teknologi informasi, kesehatan, dan manufaktur (Bundesbank Economic Report, 2023). Data dari Federal Employment Agency menunjukkan bahwa tingkat pengisian lowongan kerja terampil meningkat 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sekitar 60% posisi diisi oleh tenaga kerja asing. Namun, dampak ekonomi positif ini dibarengi dengan tantangan sosial yang kompleks. Survei terbaru dari Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2023) mengungkapkan bahwa 45% pekerja asing mengalami kesulitan integrasi di tempat kerja, terutama karena hambatan bahasa dan perbedaan budaya kerja. Selain itu, terjadi peningkatan ketegangan sosial di beberapa kota besar, dengan 38% penduduk lokal melaporkan kekhawatiran tentang perubahan demografi dan kompetisi di pasar tenaga kerja. Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam upaya menjaga kohesi sosial sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi negara.

Dari perspektif teori Aktor Rasional, kebijakan imigrasi Jerman mencerminkan keputusan strategis berbasis kalkulasi manfaat dan biaya. Pemerintah Jerman bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari liberalisasi tenaga kerja imigran terhadap perekonomian negara (Sebastian & Ulceluse, 2019). Dengan menerapkan pendekatan berbasis poin dalam Chancenkarte, Jerman berupaya menarik tenaga kerja berkualitas tinggi yang dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012).

Namun, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan resistensi dari kelompok domestik yang merasa dirugikan oleh arus tenaga kerja asing. Beberapa kelompok pekerja lokal menganggap kebijakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas pekerjaan mereka, yang berpotensi memunculkan ketegangan sosial (Böhm et al., 2020). Oleh karena itu,

kebijakan integrasi yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal tetap memiliki akses terhadap peluang kerja yang adil, sementara tenaga kerja asing dapat berkontribusi tanpa menimbulkan ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja.

D. Strategi Jerman dalam Menghadapi Tantangan Kebijakan Imigrasi Tenaga Kerja

Menghadapi kompleksitas dampak kebijakan imigrasi tenaga kerja, pemerintah Jerman telah mengembangkan serangkaian strategi komprehensif untuk mengelola tantangan yang muncul. Program integrasi yang diperkuat melalui "Integration Through Qualification" telah berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pekerja asing dalam program pelatihan bahasa dan budaya sebesar 25% pada tahun 2023 (Federal Office for Migration and Refugees, 2024). Pemerintah juga menerapkan pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan integrasi, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah lokal untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah mereka. Strategi ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar €2.5 miliar untuk periode 2023-2024, yang difokuskan pada program pelatihan kejuruan, kursus bahasa intensif, dan inisiatif dialog antarbudaya. Selain itu, pemerintah telah membentuk gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan integrasi secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap kebijakan imigrasi Jerman menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tantangan dalam integrasi sosial masih menjadi kendala utama. Pemerintah Jerman telah mengalokasikan anggaran sebesar €2.5 miliar untuk program integrasi pada periode 2023–2024, dengan fokus pada peningkatan pelatihan bahasa dan profesionalisme tenaga kerja asing (News, 2023).

Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyederhanaan proses administrasi dan penguatan program pelatihan bagi pekerja lokal untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing (Sebastian & Ulceluse, 2019). Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendorong keterampilan tenaga kerja domestik, Jerman dapat menghadapi risiko ketergantungan jangka panjang pada tenaga kerja migran, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut (Cerna, 2014).

E. Analisis Kebijakan Imigrasi Tenaga Kerja Jerman Berdasarkan Model Aktor Rasional

Analisis kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman melalui perspektif model aktor rasional menunjukkan bahwa pemerintah Jerman telah mengambil keputusan strategis berdasarkan kalkulasi untung-rugi yang sistematis. Studi dari German Economic Institute (2024) mengungkapkan bahwa keputusan untuk meliberalisasi kebijakan imigrasi didasarkan pada proyeksi defisit tenaga kerja sebesar 7 juta pekerja pada tahun 2035 jika tidak ada intervensi kebijakan. Pemerintah Jerman, sebagai aktor rasional, mengidentifikasi bahwa biaya ekonomi dari tidak mengambil tindakan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial dan politik dari implementasi kebijakan imigrasi yang lebih terbuka. Pendekatan ini tercermin dalam desain Skilled Immigration Act yang mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor strategis sambil tetap mempertahankan standar kualifikasi yang tinggi. Rational choice framework yang diterapkan juga terlihat dalam strategi pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat imigrasi melalui sistem poin dan kriteria seleksi yang ketat, yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi sambil meminimalkan potensi dampak sosial negatif. Analisis menggunakan model aktor rasional ini menunjukkan bahwa kebijakan

imigrasi Jerman merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berorientasi pada optimalisasi hasil.

Kesimpulan

Kebijakan imigrasi tenaga kerja Jerman telah memberikan dampak positif dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, tetapi tantangan integrasi sosial dan resistensi dari masyarakat lokal masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan menerapkan pendekatan berbasis aktor rasional, pemerintah Jerman terus menyesuaikan kebijakan ini agar dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas program integrasi, pengelolaan distribusi tenaga kerja yang adil, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan imigrasi yang diterapkan.

Referensi

- Andiyani, E. N., Triristina, N., & Iskandar, W. N. R. (2024). Pengaruh Kebijakan “Open Door Policy” terhadap Pergeseran Sosial dan Politik di Jerman. *AGRAPANA*, 1(2).
- BMWK. (2024). Possibilities of skilled worker immigration. *Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) Public Relations*.
- Böhm, M. J., Gregory, T., Qendrai, P., & Siegel, C. (2020). Demographic Change and Regional Labour Markets Demographic Change and Regional Labour Markets. *IZA Institute of Labor Economics*, 13883.
- Cerna, L. (2014). The EU Blue Card: Preferences, policies, and negotiations between Member States. *Migration Studies*, 2(1), 73–96. <https://doi.org/10.1093/migration/mnt010>
- Chance, M., & Brown, B. (2025). Anti-immigrant anger rises at scene of German market attack. *CNN*.
- Edu, N. (2025). 5 Pendekatan Utama Analisis Kebijakan Luar Negeri. *Norwich University*, 2025.
- Foundation, B., & Schultz, S. (2024). Jerman Butuh 288 . 000 Pekerja Asing

- Setiap Tahun hingga 2040 Profesi yang Dicari di Jerman. <https://amp.dw.com/id/Jerman-Butuh-288000-Pekerja-Asing-Setiap-Tahun-Hingga-2040/a-70894943>.
- Jones, E. R. (2025). Teori Aktor Rasional. *The Decision Lab*, 2025.
- Lutfie, R. Z., Opranata, W., Riyadinta, N., & Alunaza, H. (2021). Dampak Open Door Policy Pada Stabilitas Ekonomi dan Politik Jerman serta Hubungan dengan Uni Eropa. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 1–12.
- News, C. (2023). Social isolation and loneliness among refugees in Germany An Authority in Transition. *Federal Office for Migration and Refugees*, October.
- Palguna, F. A. (2024). Wawancara Eksklusif Duta Besar Ina Lepel : Begini Cara Jerman Atasi Kekurangan Tenaga Kerja Terampil. *Tempo*.
- Remáč, M. (2015). Briefing Implementation Appraisal The EU Blue Card Directive. *European Parliamentary Research Service*, July 2014.
- Sebastian, R., & Ulceluse, M. (2019). The effect of immigration on natives' task specialisation: the case of Germany. *International Journal of Manpower*, 40(5), 939–957. <https://doi.org/10.1108/IJM-08-2018-0269>
- Shabani, A. (2024). Germany Urgently Needs 288 , 000 Skilled Foreign Workers Annually to Maintain Its Economy. *Schengen.News*, 2024.
- Shadunts, A. (2016). The Rational Actor Assumption in Structural Realism. *E-International Relations*, 01–10. <https://www.researchgate.net/publication/320980555>
- Sommer, I. (2021). Recognition of foreign qualifications in Germany: Selectivity and power in re-making professionals. *International Migration*, 59(4), 26–41. <https://doi.org/10.1111/imig.12831>
- Stel, N. (2021). Uncertainty, exhaustion, and abandonment beyond South/North divides: Governing forced migration through strategic ambiguity. *Political Geography*, 88(June 2020), 102391. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102391>
- Sugito, S. (2021). Eropanisasi Kebijakan Imigrasi Dan Politisasi Keamanan Imigran Di Negara-Negara Visegrad. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.3>
- Wildatul Husna. (2024). *Upaya India Dalam Menangani Krisis Pangan Akibat Perubahan Iklim Global Periode 2021-2023*. 1–79. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77738>
- Xinhua. (2023). Jerman lakukan upaya tangani isu-isu migrasi. *ANTARA*.